

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Provinsi Jawa Barat menurut data Badan Pusat Statistik Jawa Barat memiliki 18 kabupaten dan 9 kota yang diantaranya merupakan Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar. Pusat pemerintahan daerah Jawa Barat terletak pada kota Bandung.

Provinsi Jawa Barat menurut berita yang dilansir dari website pemerintah daerah Jawa Barat pada tanggal 26 Agustus 2017, tingkat kemandirian keuangan provinsi Jawa Barat termasuk tinggi (diakses 22 September 2018). Tingginya tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 memiliki arti bahwa provinsi Jawa Barat sudah termasuk daerah yang mandiri dari segi finansial nya. Hal ini terlihat dari tingginya rasio kemandirian keuangan daerah dan tingkat Pendapatan Asli Daerah nya yang mencapai angka Rp 17.042 triliun. Berdasarkan perhitungan dari data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa pada tahun 2017 provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam 5 besar provinsi yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi di Indonesia. Berikut tabel mengenai 5 provinsi dengan tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi di Indonesia tahun 2017.

**Tabel 1.1**  
**Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2017 di Indonesia**

<b>Provinsi</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Tingkat Kemandirian</b>
Jawa Barat	24.054.880.848.030	17.102.520.315.839	71%
DKI Jakarta	64.823.887.369.820	43.901.488.807.743	68%
Banten	9.704.663.527.155	5.756.379.172.247	59%
Jawa Timur	29.879.141.546.244	17.326.461.167.059	58%
Kalimantan Timur	8.154.747.837.157	4.588.751.727.469	56%

*Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2018) (diolah)*

Peneliti melakukan penelitian dengan mengambil Jawa Barat sebagai objek penelitian dikarenakan dengan tingginya tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi yang dicapai pada tahun 2017 yang dimana mencapai 71%.

### **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas Otonomi yang dimaksud dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintahan daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Otonomi daerah itu sendiri merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian diatas, penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintahan daerah seluruhnya merupakan hak dan wewenang dan juga kewajiban daerah itu sendiri untuk mengatur jalannya pemerintahan daerah secara mandiri.

Menurut UU No.23 Tahun 2014 kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan

sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia yang disajikan dalam Tabel 1.2, rata-rata Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) kabupaten dan kota provinsi Jawa Barat meningkat untuk periode 2014-2017. Namun tingkat kemandirian keuangan daerah seluruh kabupaten/kota provinsi Jawa Barat rata-rata rendah dari 2014-2017 dan berada pada pola hubungan konsultatif atau bisa diartikan masih belum begitu dapat dikatakan mandiri secara finansial namun campur tangan dari pemerintah pusat sudah semakin berkurang, karena daerah dianggap sudah mulai mampu melaksanakan otonomi. Walaupun rata-rata kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat pada tahun 2014-2017 terlihat meningkat setiap tahunnya, tetapi masih sedikit kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat yang sudah dinyatakan kategori kemandiriannya tinggi dibandingkan dengan kabupaten dan kota yang dinyatakan kategori kemandiriannya rendah atau bahkan sangat rendah. Dengan begitu pemerintah pusat masih beranggapan beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Barat ketergantungan dengan bantuan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Berikut rata-rata tingkat kemandirian keuangan kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Barat tahun 2014-2017 disajikan dalam Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Rata-rata Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat 2014-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Persentase</b>	<b>Kemandirian Keuangan Daerah</b>	<b>Pola Hubungan</b>
2014	26%	Rendah	Konsultatif
2015	28%	Rendah	Konsultatif
2016	29%	Rendah	Konsultatif
2017	36%	Rendah	Konsultatif

*Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (data diolah 2018)*

Kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar atau kecilnya pendapatan asli daerah tersebut dibandingkan tingkat pendapatan daerah dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat maupun dari pinjaman lainnya (Susanti et al, 2016). Semakin tinggi persentase Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) suatu daerah, maka semakin mandiri suatu daerah tersebut dalam mengelola pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangannya.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) suatu daerah dapat dilihat salah satunya dari tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya. Menurut Susanti (2016) jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) juga meningkat, sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) juga rendah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.23 Tahun 2014 merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah atau yang selanjutnya disebut TKKD (Susanti et al, 2016). Tetapi terdapat pendapat lain dari peneliti yang pernah melakukan penelitian sejenis yang menemukan bahwa Pendapatan Asli suatu Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan suatu daerah (Putri et al, 2012).

Selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), variabel yang dapat mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) adalah bisa dilihat dari tingkat Dana Alokasi Umum (DAU) yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam pengimplementasian otonomi daerah, terdapat kendala yaitu adanya kesenjangan antar daerah. Bentuk langkah pemerintah pusat dalam menanggulangi kendala tersebut dengan memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Umum (Ariani dan Putri, 2015). Jika Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) akan menurun menurut Marizka (2013). Dana Alokasi Umum menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah serta PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan untuk melakukan pemerataan keuangan antar daerah agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah maupun antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Tingkat Dana Alokasi Umum (DAU) dapat diukur dengan menghitung kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) itu sendiri terhadap total pendapatan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) (Susanti et al, 2016). Tetapi pada penelitian lain menurut (Ariani dan Putri, 2016) menyebutkan bahwa tingkat Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD).

Berdasarkan data yang diolah peneliti dari Dirjen Perimbangan Keuangan Republik Indonesia seperti terdapat pada Tabel 1.3, dapat dilihat bahwa Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) yang seharusnya memiliki pengaruh yang negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) atau dalam kata lain berlawanan.

**Tabel 1.3**  
**Kontribusi Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Daerah dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, Karawang, Purwakarta, Sumedang, Kota Bandung, Bogor, Cirebon, Depok, Tasikmalaya dan Banjar Tahun 2016-2017**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Keterangan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kab. Indramayu	Kontribusi DAU (↑)	<b>45%</b>	<b>68%</b>
	TKKD (↑)	<b>13%</b>	<b>21%</b>
Kab. Karawang	Kontribusi DAU (↑)	<b>35%</b>	<b>49%</b>
	TKKD (↑)	<b>39%</b>	<b>51%</b>
Kab. Purwakarta	Kontribusi DAU (↑)	<b>46%</b>	<b>51%</b>

(Bersambung)

(Sambungan)

	TKKD (↑)	<b>22%</b>	<b>28%</b>
Kab. Sumedang	Kontribusi DAU (↑)	<b>48%</b>	<b>60%</b>
	TKKD (↑)	<b>17%</b>	<b>26%</b>
Kota Bandung	Kontribusi DAU (↑)	<b>29%</b>	<b>40%</b>
	TKKD (↑)	<b>61%</b>	<b>82%</b>
Kota Bogor	Kontribusi DAU (↑)	<b>37%</b>	<b>47%</b>
	TKKD (↑)	<b>57%</b>	<b>75%</b>
Kota Cirebon	Kontribusi DAU (↑)	<b>43%</b>	<b>44%</b>
	TKKD (↑)	<b>36%</b>	<b>48%</b>
Kota Depok	Kontribusi DAU (↑)	<b>35%</b>	<b>41%</b>
	TKKD (↑)	<b>59%</b>	<b>75%</b>
Kota Tasikmalaya	Kontribusi DAU (↑)	<b>49%</b>	<b>61%</b>
	TKKD (↑)	<b>19%</b>	<b>24%</b>
Kota Banjar	Kontribusi DAU (↑)	<b>46%</b>	<b>64%</b>
	TKKD (↑)	<b>17%</b>	<b>18%</b>

*Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementreian Keuangan Republik Indonesia. (data diolah 2018)*

Tetapi seperti telah disajikan pada Tabel 1.3, pada laporan realisasi APBD provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2017 terdapat suatu fenomena dimana Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang positif Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) atau dalam kata lain tidak berlawanan. Dapat dilihat pada kabupaten Indramayu, Karawang, Purwakarta, Sumedang, Kota Bandung, Bogor, Cirebon, Depok, Tasikmalaya, dan Banjar yang dimana memiliki Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) yang mengalami peningkatan ketika kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami peningkatan.

Sebuah pemerintah daerah dengan kualitas layanan publik yang baik selalu diikuti dengan tingginya partisipasi publik terhadap pembangunan yang dicerminkan dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan pemerintah daerah tersebut untuk belanja daerah termasuk belanja modal yang kemudian diwujudkan ke dalam pembangunan daerah dan perbaikan infrastruktur daerah di berbagai sektor (Ariani dan Putri, 2015). Dengan kata lain variabel lain

yang dapat mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) belanja modal yang dimiliki suatu daerah. Apabila suatu daerah tidak dapat membiayai belanjanya sendiri akan dibantu dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Kemandirian keuangan daerah berkaitan dengan realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan daerah sehingga penyerapan belanja modal yang baik akan membantu pemerintah daerah meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Nur'ainy et al, 2013). Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dalam SAP juga dijelaskan belanja modal terdiri dari beberapa jenis diantaranya Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Modal Fisik Lainnya. Tingkat Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) (Ariani dan Putri, 2016). Tetapi pada penelitian lain menunjukkan hasil dimana Belanja Modal tidak memiliki pengaruh pada Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) (Yulihantini et al, 2018).

Dapat dilihat dari hasil olah data Dirjen Perimbangan Keuangan Republik Indonesia yang dilakukan oleh peneliti pada Tabel 1.4, bahwa terdapat 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat belanja modal yang tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan (TKKD).

**Tabel 1.4**  
**Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten**  
**Bekasi, Bogor, Indramayu, Majalengka, Tasikmalaya, Kota Bandung,**  
**Bekasi, Bogor, dan Cirebon Tahun 2016-2017**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Keterangan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kab. Bekasi	Belanja Modal (↓)	<b>27%</b>	<b>20%</b>
	TKKD (↑)	<b>72%</b>	<b>87%</b>
Kab. Bogor	Belanja Modal (↓)	<b>24%</b>	<b>22%</b>

*(Bersambung)*

(Sambungan)

	TKKD (↑)	<b>62%</b>	<b>77%</b>
Kab. Indramayu	Belanja Modal (↓)	<b>29%</b>	<b>23%</b>
	TKKD (↑)	<b>13%</b>	<b>21%</b>
Kab. Majalengka	Belanja Modal (↓)	<b>24%</b>	<b>23%</b>
	TKKD (↑)	<b>15%</b>	<b>23%</b>
Kab. Tasikmalaya	Belanja Modal (↓)	<b>22%</b>	<b>17%</b>
	TKKD (↑)	<b>7%</b>	<b>14%</b>
Kota Bandung	Belanja Modal (↓)	<b>22%</b>	<b>17%</b>
	TKKD (↑)	<b>61%</b>	<b>82%</b>
Kota Bekasi	Belanja Modal (↓)	<b>32%</b>	<b>26%</b>
	TKKD (↑)	<b>61%</b>	<b>64%</b>
Kota Bogor	Belanja Modal (↓)	<b>26%</b>	<b>19%</b>
	TKKD (↑)	<b>57%</b>	<b>75%</b>
Kota Cirebon	Belanja Modal (↓)	<b>20%</b>	<b>16%</b>
	TKKD (↑)	<b>36%</b>	<b>48%</b>
Kota Depok	Belanja Modal (↓)	<b>37%</b>	<b>32%</b>
	TKKD (↑)	<b>59%</b>	<b>75%</b>

*Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementreian Keuangan Republik Indonesia. (data diolah 2018)*

Dibuktikan pada tahun 2016-2017 seperti disajikan dalam Tabel 1.4 Kabupaten Bekasi, Bogor, Indramayu, Majalengka, Tasikmalaya, Kota Bandung, Bekasi, Bogor, Cirebon, Depok mengalami penurunan Belanja Modal tetapi mengalami peningkatan pada Tingkat Kemandirian Keuangan (TKKD) nya. Berdasarkan fenomena beserta adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) kabupaten/kota di Jawa Barat maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) pada Provinsi Jawa Barat.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) kabupaten dan kota provinsi Jawa Barat rata-rata tiap tahun meningkat pada periode 2014-2017. Semakin tinggi persentase Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) suatu daerah, maka semakin mandiri suatu daerah tersebut dalam mengelola pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangannya. Berdasarkan data yang diolah peneliti, rata-rata kemandirian keuangan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat mayoritas berada pada angka 25%-50% yang dimana berada pada pola konsultatif atau dengan kata lain disebut rendah dan bisa diartikan masih belum begitu dapat dikatakan mandiri secara finansial namun campur tangan dari pemerintah pusat sudah semakin berkurang, karena daerah dianggap sudah mulai mampu melaksanakan otonomi. Besarnya penerimaan yang dimiliki oleh kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Barat masih didominasi oleh sumbangan dan transfer dari pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan suatu daerah dapat dinilai dari tingkat Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, serta Belanja Modal dari suatu daerah. Jika DAU meningkat maka Tingkat TKKD akan menurun. Namun pada kenyataannya, masih ada daerah yang memiliki pengaruh yang positif antara DAU dan TKKD atau dalam kata lain tidak berlawanan seperti seharusnya. Terakhir adalah tingkat Belanja Modal Jawa Barat yang jika disaat meningkat akan berdampak pada meningkatnya juga TKKD daerah begitupun sebaliknya. Tetapi ada beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat yang kenaikan dan penurunan Belanja Modal nya tidak diikuti dengan kenaikan dan penurunan TKKD.

### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas dapat diperoleh beberapa pertanyaan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, penerimaan Pendapatan asli Daerah, penerimaan Dana Alokasi Umum, dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2014-2017?

2. Seberapa besar pengaruh simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2014-2017?
3. Apakah terdapat pengaruh parsial dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2014-2017?
4. Apakah terdapat pengaruh parsial dari Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2014-2017?
5. Apakah terdapat pengaruh parsial dari Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2014-2017?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah bertujuan untuk memecahkan rumusan masalah diatas yang diantaranya:

1. Mengetahui bagaimana Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, penerimaan Pendapatan Asli Daerah, penerimaan Dana Alokasi Umum, dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2014-2017.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2014-2017.
3. Mengetahui apakah terdapat pengaruh parsial dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2014-2017.
4. Mengetahui apakah terdapat pengaruh parsial dari Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2014-2017.

5. Mengetahui apakah terdapat pengaruh parsial dari Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2014-2017.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Aspek Teoritis**

Dilihat dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya yang meneliti pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian ini juga memiliki manfaat bagi individu peneliti sendiri yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai bagaimana tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, lalu apa saja faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah.

### **1.6.2. Aspek Praktis**

Dilihat dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

#### **1. Pemerintah**

Penelitian ini memiliki manfaat bagi pemerintah khususnya pemerintahan daerah yakni sebagai gambaran mengenai pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pemerintah agar dapat mengatur strategi dalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga meningkatkan kemandirian keuangan daerah atau untuk sekedar mempertahankan tingkat kemandirian agar tidak menurun dari tahun sebelumnya.

#### **2. Masyarakat**

Penelitian ini memiliki manfaat bagi masyarakat dalam memberikan informasi atau gambaran kepada masyarakat mengenai tingkat kemandirian keuangan daerahnya agar masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam mengevaluasi untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang ada di Indonesia.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.7.1. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Data dalam penelitian ini merupakan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang didapat dari data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

### **1.7.2. Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yang pertama merupakan variabel dependen. Variabel dependen dari penelitian ini adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Jenis Variabel yang kedua pada penelitian ini merupakan variabel independen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan yang terakhir ada Belanja Modal.

### **1.7.3. Waktu dan Periode Penelitian**

Waktu yang diperlukan untuk melakukan proses penelitian ini selama 8 bulan yaitu September 2018 - April 2019. Penelitian ini berfokus pada periode 2014 sampai dengan 2017 terkait Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.

## **1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Pemilihan Judul, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, sehingga permasalahan tersebut memiliki titik fokus dan tidak mengambang dari judul yang telah dibuat.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori terkait penelitian dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik, masalah, atau variabel penelitian, difokuskan pada teori-teori yang sudah baku dan teruji secara ilmiah. Setelah itu penulis menguraikan pula kerangka pemikiran yang dimana membahas rangkaian penalaran yang akan digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian

sehingga dapat terbentuk kerangka pemikiran yang akan mengantarkan pada kesimpulan penelitian. Setelah itu penulis menguraikan hipotesis penelitian pada bab ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan pendekatan-pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data. Diantaranya menguraikan karakteristik penelitian, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menyajikan hasil penelitian serta pembahasannya yang harus diuraikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian. Diantaranya menguraikan karakteristik responden, hasil penelitian itu sendiri, pembahasan dari hasil penelitian yang didapat.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis menguraikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian, yang disajikan dalam bentuk kesimpulan penelitian serta penulis menguraikan saran yang dirumuskan secara kongkrit atas hasil penelitian yang didapat.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**